

**ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN PEDESAAN DAN EFEKTIFITAS
PROGRAM PENGENTASANNYA DI KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN
SAROLANGUN**

Oleh :

Yekti Susanti, M. Syurya Hidayat dan M. Syamsuddin

**(Alumni Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi)**

Abstract

This research is aims: 1) To determine the state of the social and economic aspects of the poor in Sub Sarolangun 2) To determine the effect of social and economic conditions against poverty in Sub Sarolangun 3) To determine the effectiveness of the surgical program on poverty reduction in Sub Sarolangun

The data used in this study are primary data and secondary data based on time (time series), with descriptive and quantitative analysis techniques using multiple regression and simple correlation.

The results of this study indicate that: 1) In general, the level of education of the poor in Sub Sarolangun is low the number of family members are quite large. Where most of the population is working although there is still a poor family who does not work 2) simultaneously and partially education level, number of dependents, work status, income and access to capital significantly affect the poverty population in Sub Sarolangun 3) Surgical Program home Sarolangun local government has succeeded in reducing the number of poor people who are in District Sarolangun.

Keywords :*Determinants of Poverty, Rural, Effectiveness Program.*

I. PENDAHULUAN

Akibat krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 jumlah penduduk miskin meningkat kembali, pada tahun 1999 jumlah penduduk miskin mencapai 47,9 juta jiwa atau mencapai 23,4 persen. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin, hingga pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin menjadi 37,3 juta jiwa atau 17,4 persen dari total penduduk atau menurun sebesar 1,1 juta jiwa. (BPS, 2010).

Dalam kaitannya dengan pendidikan, terlihat indikasi semakin majunya pendidikan yang dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Dengan demikian makin majunya pendidikan makin meningkatkan efektivitas masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan menurunkan kemiskinan.

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan dana pembangunan dan persentase penduduk yang bersekolah, angka kemiskinan penduduk dalam Provinsi Jambi tercatat relatif tinggi. Jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi tahun 1999 sebesar 458.116 jiwa atau 19,39 persen dan pada tahun 2008 sebesar 555.810 jiwa atau 21,63 persen. Angka kemiskinan tahun 1999-2009 cenderung mengalami peningkatan. Di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin adalah sebanyak

8.102 KK yang menyebar diseluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun. Apabila diasumsikan rata-rata dalam satu keluarga terdapat lima orang anggota keluarga maka pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun lebih dari 40.000 jiwa. (BKKBN Kabupaten Sarolangun, 2010).

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun menyebar diseluruh Kecamatan, bahkan tidak terkecuali di Kecamatan Sarolangun yang merupakan pusat penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKKBN Kabupaten Sarolangun jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sarolangun pada tahun 2010 adalah sebanyak 682 KK, meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 571 KK.

Fenomena membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten sarolangun dan peningkatan sosial ekonomi, ternyata belum diimbangi penurunan jumlah penduduk miskin secara absolut, khususnya di kecamatan Sarolangun Kabupaten sarolangun Fenomena kemiskinan itu sendiri bukan hanya menjadi gambaran sosial ekonomi saja, termasuk aspek budaya dan geografis. Namun demikian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi dan pendidikan dengan maksud sebagai perbandingan dari keberhasilan program pembangunan. Bagaimanapun juga keberhasilan pembangunan yang tidak diikuti

dengan penurunan jumlah penduduk miskin baik secara absolut maupun relatif dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kegagalan pelaksanaan program pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah berupaya mengentaskan penduduk miskin melalui berbagai kebijakan, baik kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun sendiri. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi program kemiskinan adalah kebijakan bedah rumah yang telah berjalan hampir 4 tahun, namun kebijakan-kebijakan tersebut belum mampu mengurangi angka kemiskinan, khususnya di Kecamatan Sarolangun.

Penelitian ini di buat pertama bertujuan untuk mengetahui keadaan aspek sosial dan ekonomi penduduk miskin di Kecamatan Sarolangun, yang kedua untuk mengetahui pengaruh kondisi sosial dan ekonomi terhadap kemiskinan di Kecamatan Sarolangun, dan yang ketiga untuk mengetahui hubungan program pengentasan terhadap kemiskinan di Kecamatan Sarolangun.

II. TINJAUAN TEORI

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mulai dirasakan memberikan dampak

yang negatif, terutama semakin melebar ketimpangan pembangunan, baik ketimpangan pembangunan antar wilayah maupun ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Disinilah mulai banyak disadari negara-negara sedang berkembang bahwa “pertumbuhan” tidak identik dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang melebihi negara-negara maju pada tahap awal ternyata menimbulkan masalah dikemudian hari, diantaranya adalah masalah-masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan serta ketimpangan struktural menurut Syahrir dalam Kuncoro (2000) Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Hal ini dapat dilihat dari semakin pesat masuknya tenaga kerja dan modal atau semakin meningkatnya efisiensi atau kedua-duanya. Kuznets berpendapat bahwa laju kenaikan produktivitas ternyata dapat menyelesaikan hampir seluruh pertumbuhan produk per kapita di negara maju. (Jhingan, 2006).

Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang dipelopori oleh Adam Smith, bahwa sumber-sumber

pertumbuhan produksi nasional terdiri dari pertumbuhan tenaga kerja dan kapital, perbaikan efisiensi dalam penggunaan kapital oleh tenaga kerja melalui spesialisasi dan kemajuan teknologi, serta perdagangan internasional yang dapat memperluas pasar (Boediono, 2004). Menurut Adam Smith, makin besar stok modal makin besar pula kemungkinan spesialisasi dan pembagian kerja yang akan meningkatkan produktivitas per kapita, sehingga akan menghasilkan output. Jadi pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Arsyad, 2002). Dengan meningkatnya pendapatan penduduk pada suatu daerah bisa mengundang penduduk daerah lain untuk beraktivitas di daerah tersebut, bahkan bisa terjadi urbanisasi secara perlahan atau bertahap.

Pembangunan Ekonomi

Paradigma baru dalam pembangunan ekonomi pada dasawarsa 1960-an mulai banyak disadari negara-negara sedang berkembang bahwa “pertumbuhan” tidak identik dengan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang melebihi negara-negara maju pada tahap awal ternyata menimbulkan masalah di kemudian hari, diantaranya adalah : masalah-masalah pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan serta ketimpangan struktural Syahrir dalam Kuncoro (2000) pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi

barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Konsep Kemiskinan

Definisi Kemiskinan

Menurut John Friedman dalam Sukirno (2000) Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, meliputi modal yang produktif, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik (Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial saja, tapi juga aspek natural material). Definisi kemiskinan lain dikemukakan oleh Wolf Scott dalam Sukirno (2000), yang umumnya di definisikan dari segi pendapatan (Dalam jumlah uang) ditambah dengan keuntungan non-material yang diterima seseorang, cukup tidaknya memiliki aset seperti tanah, rumah, uang, emas dan lain-lain dimana kemiskinan non-material yang meliputi kebebasan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Senada dengan kedua pendapat di atas Bank Dunia memberikan beberapa aspek mengenai kemiskinan, yaitu pendapatan yang rendah, kekurangan gizi atau keadaan kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah.

Indikator Kemiskinan

Sayogyo dalam Prayitno dan Santoso (2006) menentukan garis kemiskinan dengan menggunakan

konsumsi beras per kapita. Untuk daerah pedesaan ditentukan 240 Kg per kapita per tahun sedangkan kota 360 Kg per kapita per tahun. Untuk mencari nilai konsumsinya, masing-masing kuantitas tersebut dikalikan harga beras pada saat yang bersangkutan dan rata-rata anggota tiap rumah tangga adalah 5 orang.

Tabel Garis kemiskinan menurut Sayogyo :

Kriteria	Pedesaan	Perkotaan
Melarat	180 Kg	270 Kg
Sangat Miskin	240 Kg	360 Kg
Miskin	320 Kg	480 Kg

Sumber : Prayitno dan Santoso (2006)

Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut, yaitu apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yaitu keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin, karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, maka keadaan ini dikenal dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu berdasarkan pola waktunya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi persisten poverty (kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun),

cyclical poverty (kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan), seasonal poverty (kemiskinan musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan pertanian) serta accidental poverty (kemiskinan karena terjadinya bencana alam/dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, (Kartasmita, 2006).

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Tjiptoheriyanto (1989) Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan baik dari aspek ekonomi maupun non ekonomi, diantaranya adalah PDRB atau pendapatan perkapita, dana pembangunan dan tingkat pendidikan Tolok ukur yang paling banyak dipakai dan menjadi pusat perhatian ekonomi makro adalah pendapatan nasional (Soediono, 1994). Hal ini dimaklumi karena dengan memperhatikan atau menghitung pendapatan nasional akan dapat dilihat pula kemakmuran suatu negara, wilayah atau masyarakat tertentu. Karena itu untuk meningkatkan kemakmuran adalah meningkatkan pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita (Ace, 1991).

Program Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun secara kuantitatif, sanga diperlukan agar Program penanggulangan kemiskinan yang dievaluasi meliputi yang program Proyek Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri (Self Employment Program), dan Proyek Pembangunan Fisik dalam program PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya (Public Work Program)

Pertama P2KP adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat. Utamanya ditujukan bagi masyarakat miskin di daerah perkotaan yang menerima dampak paling berat akibat krisis ekonomi. Dijelaskan pula bukan berarti masyarakat miskin perdesaan tidak diperhatikan. Tetapi masyarakat miskin perkotaan menjadi skala prioritas utama program ini, karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain sandaran ekonomi keluarganya. Di sisi lain menurut pemahaman saya, masyarakat miskin perkotaan karena kondisi dan pengaruh kepentingan tertentu, memiliki peluang besar untuk melakukan gerakan massa guna memperoleh hak-hak dasar mereka. Bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Seperti pernah terjadi, terprovokasinya gerakan anarki dalam bentuk penjarahan dan pengrusakan oleh sebagian massa daerah perkotaan sebagai akibat kecemburuan sosial dan ekonomi. Sementara masyarakat perdesaan meskipun memiliki peluang yang sama, tetapi karakter kepribadian dan lingkungan mereka yang saling berbeda, kemungkinan melakukan gerakan massa sangat relatif. Kecuali provokasi bernuansa SARA, yang dilakukan secara sistematis untuk suatu kepentingan politik.

Program pengentasan kemiskinan bukan sekedar program pemberdayaan ekonomi yang bersifat penyelamatan (rescue) atau pemulihan (recovery) yang berjangka pendek seperti program sejenis lainnya. Tetapi lebih merupakan pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) melalui pemberdayaan masyarakat (community empowerment) secara utuh, simultan, berkelanjutan dan berjangka panjang. Di dalam implementasinya, lebih diutamakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan di tingkat paling bawah (kelurahan dan desa) melalui pendekatan tribina (bina lingkungan, ekonomi dan sosial). Artinya, menurut pemahaman saya melalui program kemiskinan akan digali dan dibangun kembali akan budaya serta kelembagaan tradisional yang kental akan nuansa kebersamaan dan gotong royong. Sebuah tata kehidupan yang penuh dengan suasana silih asah, silih asih dan silih asuh (saling mendidik, saling mengasih dan saling membantu).

Sebagai stimulan, melalui program P2KP, Banes, PNPM Mandiri diupayakan dana pinjaman sebesar USD 100 juta (sekitar Rp 800 milyar) dari Bank Dunia guna membantu masyarakat miskin di daerah perkotaan yang tergabung di dalam organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam rangka memberdayakan kehidupan mereka baik di bidang ekonomi melalui pengembangan usaha kecil (*small scale business*), pembangunan dan perbaikan sarana dan

prasarana lingkungan serta penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Artinya, sekali lagi menurut pemahaman saya, bantuan dan pinjaman bagi masyarakat miskin bukanlah tujuan utama program P2KP. Dana hanyalah sekedar sarana untuk membangkitkan kesadaran masyarakat sasaran akan pentingnya membangun keberdayaan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey. Menurut Singarimbun (1989) bahwa yang dimaksud dengan penelitian survei adalah penelitian yang menggunakan sampel sebagai pengumpul data pokok.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang akan diolah dan dianalisis adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Penduduk Kecamatan Sarolangun menurut Desa/Kelurahan
2. Jumlah penduduk miskin

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. BPS Kabupaten Sarolangun
2. BPS Kecamatan Sarolangun
3. Kantor Camat Kecamatan Sarolangun
4. Bappeda Kabupaten Sarolangun
5. BKKBN Kabupaten Sarolangun
6. Kuisisioner

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah menggunakan Teknik Random Sampling atau pemilihan secara acak dari sampel yang ada di Kecamatan Sarolangun yaitu satu kelurahan dan satu desa guna mewakili enam kelurahan dan sepuluh desa yang ada di Kecamatan Sarolangun itu sendiri.

Teknik Penarikan Sampel

Untuk teknik penarikan sampel yang digunakan adalah menentukan lokasi yang dipilih yaitu Kecamatan Sarolangun dengan mengambil 2 (dua) lokasi sebagai sampelnya terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 1 (satu) Desa yang masing-masing mewakili 6 (enam) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa yang ada dalam Kecamatan Sarolangun.

Adapun metode penarikan sampel yang digunakan ialah Metode Two Stage Random Sampling, adapun jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 (seratus) penduduk miskin.

Metode Analisis Data

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama digunakan analisis deskriptif. Dalam metode analisis ini ditampilkan dalam bentuk data dan tabel, kemudian dilakukan analisa mengenai fenomena-fenomena yang terdapat dalam data dan tabel tersebut.

Tujuan penelitian kedua dengan menggunakan alat analisis regresi berganda dengan formulasi :

$$Y = f (P, TK, SB, Pdp, AP, ei) \dots (1)$$

$$Y = \alpha + \alpha_1 P + \alpha_2 JT + \alpha_3 SB + \alpha_4 Pdp + \alpha_5 AP + ei \dots (2)$$

$$Y = \alpha + \alpha_1 \text{Log } P + \alpha_2 \text{Log } JT + \alpha_3 \text{Log } SB + \alpha_4 \text{Log } Pdp + \alpha_5 \text{Log } AP \dots (3)$$

Dimana :

- Y = Tingkat konsumsi (pengeluaran)
P = Pendidikan
JT = Jumlah Tanggungan
SB = Status Bekerja
Pdp = Pendapatan
AP = Akses Permodalan
 α = Konstanta
 α_i = Koefisien elastisitas

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk Miskin di Kecamatan Sarolangun

Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin maju pola pikirnya dalam melakukan usaha dan mengembangkan usahanya. Namun tidaklah selalu demikian adanya, kadang-kadang yang berpendidikan rendah memiliki pola pikir dan kematangan berfikir yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan tinggi, hal

ini sangat tergantung dari pengalaman hidup seseorang. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Rasio (%)
Tidak Sekolah	5	5,00
SD	79	79,00
SMP	5	5,00
SMA	8	8,00
D-3	2	2,00
S1	1	1,00
Jumlah	100	100,00

Sumber : Diolah dari data primer

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah responden yang tidak bersekolah sebanyak 5 responden atau sebesar 5 persen dari seluruh jumlah responden. 79 responden atau sebesar 79 persen menamatkan Sekolah Dasar dan responden yang menamatkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 5 responden atau sebesar 5 persen dari jumlah seluruh responden, 2 responden menamatkan pendidikan SMA, sedangkan pendidikan responden yang berpendidikan D.3 berjumlah 2 orang atau sebesar 2 persen dan yang menamatkan pendidikan S.1 sebanyak 1 responden. Secara rata-rata tingkat pendidikan responden masih tergolong sangat rendah.

Jumlah Anggota Keluarga

Setiap kepala keluarga menyadari bahwa jumlah anggota keluarga sangat terkait dengan kemampuan keuangan

yang mereka miliki. Jumlah anggota keluarga menggambarkan besarnya biaya yang dipergunakan untuk keperluan keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga akan semakin besar. Begitu juga dengan penduduk yang tergolong hidup dibawah garis kemiskinan keluarga yang besar menjadi beban secara ekonomi bagi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Proporsi responden terbesar berada pada kelompok yang memiliki anggota keluarga (jumlah tanggungan) sebanyak 3 orang, yaitu sebanyak 31 responden atau sebesar 31 persen, sementara proporsi terkecil adalah mereka yang mempunyai anggota keluarga (tanggungan) sebanyak 7 orang, yaitu sebesar 1 responden .

Rata-rata jumlah anggota keluarga pada keluarga penduduk miskin di Kecamatan Sarolangun adalah sebanyak 4 orang. Apabila diasumsikan jumlah keluarga dalam satu keluarga sebanyak 4 tanggungan maka dalam satu keluarga terdapat 6 anggota keluarga.

Status Bekerja

Bekerja pada dasarnya merupakan salah satu cara mempertahankan hidup seseorang. Melalui bekerja seseorang dapat memperoleh penghasilan untuk membeli segala kebutuhan hidupnya, dari 100 orang responden, ternyata sebanyak 93 orang pada saat penelitian memiliki pekerjaan, sementara sisanya sebesar 7 orang atau 7 persen tidak memiliki pekerjaan. Hal ini

memberikan gambaran bahwa sebagian besar responden meskipun bekerja tetap belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, apalagi mereka yang tidak bekerja tentu saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka yang tidak bekerja bukan karena malas, namun secara fisik tidak memungkinkan lagi melakukan pekerjaan.

Tingkat Pendapatan

Jumlah responden tertinggi pada kelompok pendapatan secara total antara Rp. 1.193.750 – 1.404.999, yaitu sebanyak 22 responden atau sebesar 22 persen dari jumlah responden , Jumlah responden terbanyak lainnya berada di kelompok Rp. 1.771.250 – 982.499 dan 982.500 – 1.193.749, yaitu masing-masing sebanyak 19 responden, sementara jumlah responden terendah berada pada kelompok pendapatan antara Rp. 2.038.750 – 2.250.000 perbulan, yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 1 persen. Secara rata-rata pendapatan responden adalah sebesar Rp. 1.146.560 perbulan.

Akses Permodalan

Akses permodalan bagi penduduk sangat penting karena pada umumnya penduduk miskin banyak bergerak di bidang usaha kecil. Bantuan permodalan dimaksudkan untuk agar responden dapat mengembangkan usahanya lebih lanjut dan memperoleh keuntungan yang lebih besar agar pendapatan mereka meningkat. responden yang memiliki akses permodalan hanya sebanyak 7

orang atau sebesar 7 persen, sementara sisanya sebanyak 97 orang atau sebesar 97 persen tidak memiliki akses permodalan. Artinya perhatian dari instansi terkait terhadap upaya pengentasan kemiskinan masih sangat kurang. Hal ini berarti program ekonomi kerakyatan belum menyentuh upaya peningkatan kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan potensi ekonomi yang dimilikinya.

Program yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun, ternyata belum menyentuh secara langsung aspek peningkatan potensi ekonomi melalui bantuan permodalan, pembinaan teknis usaha dan tentu saja usaha menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan masyarakat.

Tingkat Pengeluaran Konsumsi Penduduk miskin

Sebagian besar responden memiliki tingkat konsumsi antara 1.450.000 – 1.599.999, yaitu masing-masing sebanyak 33 responden atau sebesar 33 persen, sementara hanya sebagian kecil tingkat konsumsi responden berada pada kelompok Rp. 1.750.000 – 1.900.000, yaitu sebanyak 3 responden atau sebesar 3 persen. Secara rata-rata tingkat konsumsi responden adalah sebesar Rp. 1.357.100.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Model Regresi Linear Berganda

Berdasarkan model persamaan regresi di bawah ini dapat diterjemahkan bahwa setiap terjadi peningkatan tingkat pendidikan formal maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,020

persen dan untuk signifikan sebesar 0.003 artinya tingkat pendidikan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sementara setiap penambahan jumlah tanggungan maka justru akan semakin meningkatkan kemiskinan sebesar 0,007 persen dan berpengaruh secara signifikan, disisi lain mereka yang berkerja dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,013 persen dan berpengaruh secara signifikan, sementara pendapatan memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan, dimana setiap terjadi peningkatan pendapatan maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0,380 persen serta berpengaruh secara signifikan dan akses permodalan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan sebesar 0.013 persen dan sebesar 0.594 artinya untuk Akses Permodalan tidak berpengaruh secara signifikan.

$$Y = 3,840 - 0,020 P + 0,007 JT - 0,13 SB + 0,380 PdP - 0,013 AP$$

Berdasarkan model persamaan regresi di atas tergambar bahwa pendidikan seseorang dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan. Artinya semakin membaik tingkat pendidikan seseorang maka akan dapat memberikan jaminan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini tidak terlepas dari pola pikir seseorang, khususnya kepala keluarga untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Jumlah Tanggungan dalam penelitian ini memberikan sumbangan yang positif terhadap kemiskinan. Artinya semakin besar jumlah anggota

keluarga miskin maka akan semakin besar pula tanggungan keluarga, yang berarti menjadi beban bagi kepala keluarga untuk menafkahi anggota keluarganya. Semakin besar jumlah anggota keluarga miskin, maka akan turun pula tingkat kesejahteraan mereka.

Status bekerja memberikan pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya penduduk miskin yang bekerja dapat mendorong peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya. Pekerjaan bagi keluarga miskin merupakan kebutuhan, karena dari hasil kerja itu pulalah mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat berapa besar variabel Xi (pendidikan, jumlah tanggungan, status bekerja, pendapatan dan akses permodalan) dapat menjelaskan variasi naik turunnya penduduk miskin. Dari hasil pengujian sebagaimana diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,893. Hal ini memberikan gambaran bahwa 89,3 persen variasi naik turunnya jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sarolangun mampu dijelaskan (pendidikan, jumlah tanggungan, status bekerja, pendapatan dan akses permodalan), sementara sisanya sebesar 10,7 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 19,33 Dengan tingkat keyakinan sebesar 95 % $\alpha = 0,05$ df = (95) (5) diperoleh nilai F tabel sebesar 2,253. Dengan demikian

nilai F hitung (19,33) lebih besar dari nilai F tabel (2,253). Artinya secara bersama-sama (pendidikan, jumlah tanggungan, status bekerja, pendapatan dan akses permodalan) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sarolangun.

Hubungan Program Bedah Rumah terhadap kemiskinan di Kecamatan Sarolangun

Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui kebijakan program bedah rumah diharapkan akan terjadi penguatan potensi ekonomi penduduk miskin, yaitu melalui penyediaan rumah yang layak huni dan memenuhi standar kesehatan.

Berdasarkan tabel di bawah tergambar bahwa sampai dengan tahun 2010 jumlah rumah yang telah memperoleh bantuan bedah rumah di Kecamatan Sarolangun adalah berjumlah 102 rumah dengan terjadi pengurang KK penduduk miskin sebanyak 50 kk. Hal ini berarti hampir 50 persen dari penduduk yang memperoleh bantuan program bedah rumah yang bukan lagi tergolong penduduk miskin. Artinya tingkat keberhasilan program bedah rumah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Sarolangun sebesar 55 KK.

Diperoleh nilai koefisien korelasi hubungan program bedah rumah dengan jumlah penduduk miskin adalah - 0,976. Hal ini berarti terdapat hubungan yang negatif dan sangat kuat antara program bedah rumah dengan

jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sarolangun. Artinya semakin besar jumlah program bedah rumah dilaksanakan maka akan semakin menurunkan jumlah penduduk miskin yang ada di kecamatan Sarolangun.

Program bedah rumah yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Sarolangun telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sarolangun, meskipun masih belum ditentukan penduduk tersebut setelah diberikan program bedah rumah ternyata tidak mengalami kehidupan yang secara ekonomi bertambah baik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara umum tingkat pendidikan penduduk miskin di Kecamatan Sarolangun adalah rendah dengan jumlah anggota keluarga yang cukup besar. Dimana sebagian besar penduduk adalah bekerja, meskipun masih terdapat keluarga miskin yang tidak bekerja
2. Secara bersama-sama dan secara parsial tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, status bekerja, pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan penduduk di Kecamatan Sarolangun.
3. Program bedah rumah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin yang terdapat di Kecamatan Sarolangun.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus menyusun program pembangunan yang berorientasi kepada pengentasan kemiskinan.
2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus mengalokasi anggaran bidang pendidikan lebih tinggi guna membantu penduduk miskin agar dapat bersekolah.
3. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus memperluas peluang usaha dan peluang kerja agar dapat menampung semua pekerja terutama penduduk miskin, mempermudah akses permodalan bagi keluarga miskin.
4. Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus tetap melanjutkan program pemberian akses permodalan bagi masyarakat miskin guna mendorong perekonomian dalam menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aima, Havidz, 1996. *An evaluation of poverty alleviation in Sarko distriek, central luzon states university*. (Disertasi S-3 tidak dipublikasikan).
- Arsyad, Lincoln, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Bapenas, 2000. *Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan Provinsi Jambi 1994- 1999*, Bappeda, BPS Provinsi Jambi.

- BKKBN, Provinsi Jambi, 2003. *Laporan Pendataan Keluarga Provinsi Jambi*, BKKBN, Provinsi Jambi.
- BKKBS, Kabupaten Sarolangun, 2010. *Laporan Pendataan Keluarga Kabupaten Sarolangun*, BKKBS, Singarimbun, Masri dan Efendi Syofyan, 1989. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- BPS, Provinsi Jambi, 2003. *Laporan Pendataan Keluarga Miskin Provinsi Jambi*, BPS, Provinsi Jambi.
- Djoyohadikusumo, Soemitro, 2004, *Pemikiran Ekonomi (Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan)*, LP3ES, Jakarta.
- Gill, Richard T, 2003, *Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jhingan, 2006, *Ekonomi Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- John Simmons, Todaro, MP, 2003. *Ekonomi Pembangunan, di Negara Dunia Ketiga*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Kantor Kemen Kesra, 2004. *Profil Penduduk Miskin Indonesia*, Kantor Menko Kesra, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan*, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad, Mar'ie, 2004. *Akar Kemiskinan di Indonesia*, <http://www.transparansi.or.id>
- Nurhasna, 1998. *Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Indonesia*, Jurnal JEBI, UI, Jakarta.
- Partadiredja, Ace, 2006. *Ekonomika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Syofyan, 1989. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Sugihardjanto, Ali, 2001. *Mengumpul Akar-Akar Kemiskinan*, Yahoma – PGI, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 2000, *Ekonomi Pembangunan*, LPFE-UI, Jakarta.
- Susanti, Ikhsan dan Widiyanti, 2000, *Indikator Ekonomi Makro*, LP FE-UI, Jakarta.
- Syahrir, Kuncoro, Mudrajad, 2000, *Ekonomi Pembangunan*, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Tan, Syamsurijal, 2005, *Infra Struktur dan Industri Dalam Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi*, Makalah pada One Day Open Discussion, tidak diterbitkan.
- Widodo, 1994. *Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*, UI Press, Jakarta.